

Model Pemberdayaan Masyarakat Perspektif Islam

Adib Susilo

Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Manajemen,
Universitas Darussalam (UNIDA), Gontor
E-mail: adib.susilo27@gmail.com

Abstract

Welfare become the trending topic of the economy from the country. One of the reasons why the country exist is to ensure welfare, just and equality for its citizens. To achieve welfare, required a symbiotic mutualism between the government as a society and the state. Hence, direct assistance shaped material from the government to public is not a solution. Thus community empowerment is required. Islam as komperhensif teaching which implemented community empowerment since the first time. Where the messenger united between supporters and emigrants and empower them in order to achieve prosperity. The type of this research is library research with the normative descriptive methods. The result shows that the people in community empowerment evenly distributed in some principle which has been implemented by the messenger in an effort to da'wah Islamiyyah. Those principle are: justice, equality, participation, award, and helping others (ta'awun). The model of empowerment, used approach parsial-kontinu and a structural approach so as to achieve three dimensions the Muslim community, which is: faith dimensions, science dimensions and the social dimension.

Keywords: society, community, empowerment, Islamic empowerment

1. Pendahuluan

Kesejahteraan menjadi topik perbincangan perekonomian suatu Negara, dimana negara harus menjamin kesejahteraan yang adil dan merata bagi rakyatnya. Hal ini tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, bahwa negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Tidak heran setiap pergantian pemimpin, isu yang akan menarik perhatian atau yang akan menjadi sorotan maupun menjadi alat promisi adalah pembangunan dan kesejahteraan yang merata untuk seluruh rakyat Indonesia, apapun profesi dan kedudukannya.

Lebih lanjut, pada Undang-Undang 1945 Bab XIV Pasal 33, telah mengatur tentang kesejahteraan sosial, dimana perekonomian haruslah disusun sebagai usaha bersama beraskan kekeluargaan. Selanjutnya, kekayaan ataupun sumber ekonomi yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak, seperti sumber daya listrik, minyak, dan lain sebagainya haruslah dikuasai oleh Negara. Lebih terpenting adalah seluruh kekayaan alam baik di darat maupun di laut yang menjadi kekuasaan Indonesia harus digunakan untuk kemakmuran rakyat.

Pada kenyataannya beberapa waktu yang lalu, muncul masalah dalam kontrak kerja dengan *freeport*, walaupun sejatinya *freeport* bukanlah masalah baru. Tentang kekayaan bumi yang diambil oleh pihak asing dan yang menikmati hasilnya hanya segelintir orang-orang yang memang sudah kaya. Padahal seharusnya kekayaan itu digunakan untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Tak lama kemudian muncul masalah perihal pengusuran beberapa wilayah di daerah Ibu Kota Jakarta yang menyeret beberapa nama pejabat penting. Belum lagi masalah trans Jakarta yang hingga kini masalah tersebut belum terselesaikan. Terkait dengan masalah tersebut di atas, Pemerintah harus bijak dalam menentukan keputusan. Demi kesejahteraan masyarakat. Begitu pula dengan daerah-daerah terpencil di gugusan pulau-pulau Indonesia. Banyak pembangunan yang belum merata, baik infrastruktur, pendidikan, kesehatan yang kesemuanya merupakan bagian dari kesejahteraan sosial.

Pertanyaan dalam penelitian ini adalah seperti apa prinsip pemberdayaan masyarakat dalam perspektif Islam? Lalu bagaimana model pemberdayaan dalam perspektif Islam? Untuk mempermudah penelitian, digunakan metode deskriptif analitik guna melihat model pemberdayaan masyarakat perspektif Islam.

2. Masyarakat dan Pemberdayaan: Definisi, Dimensi dan Indikasi

Secara konseptual, pemberdayaan berasal dari kata kekuasaan (*power*). Pemberdayaan meredistribusikan kekuasaan

dari 'kaum berdaya' kepada 'kaum tidak berdaya'. Pemberdayaan adalah suatu proses menolong kelompok atau individu yang dirugikan untuk bersaing dan berkarya secara efektif, karena semua orang mempunyai kesempatan yang sama dalam berkompetisi dalam sebuah 'permainan', dimana semua 'pemain' memiliki kesempatan untuk 'menang'.¹

Pemberdayaan bukanlah suatu pemberian melainkan suatu pembelajaran pengembangan pola pikir pribadi. Yaitu sebuah transisi dari rasa ketidakberdayaan dalam kehidupan untuk kemudian hidup aktif dan mandiri dengan kenyataan untuk membangun kemampuan dalam mengambil tindakan dan mengambil inisiatif untuk lingkungan dan masa depan. Kemudian membangun rasa kebersamaan sebagai sesama golongan yang harus selalu berberdayakan sehingga terbentuk lingkungan yang kondusif untuk saling bekerjasama dalam membangun kekuatan bersama, lalu kebutuhan-kebutuhan pokoknya (material dan spiritual) akan selalu dapat terpenuhi sehingga dapat menuntun diri mereka sendiri kepada tatanan kehidupan yang berdaya dan sejahtera.²

Menurut Harahap, fase-fase masyarakat dalam perkembangan pemikirannya terbagi menjadi beberapa fase sebagai berikut:³

a) Masyarakat tradisional

Ciri-ciri masyarakat tradisional; melihat masa lampau, menyerah pada takdir, gaya hidup konservatif, kekuatan spiritual berpengaruh kuat, masyarakat stabil hampir stagnan, menolak inovasi agama, usaha hidup tanpa perencanaan, sosial kontrol yang kuat.

b) Masyarakat transisi

Bercirikan antara lain; melihat masa kini, percaya pada masyarakat termasuk negara, gaya hidup adaptif, kekuatan sosial termasuk pemerintah sangat kuat, masyarakat stabil terbuka terhadap informasi dari luar dan bersedia menerima inovasi dari luar, usaha hidup dengan *shortterm planning*, *collective control* yang kuat.

¹ Jim Ife and Frank Tesoriero, *Community Development, Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 140-142

² Elisheva Sadan, *Empowerment and Community Planing*, (Tel Aviv: Hakibbutz Hameuchad Publishers, 2004), 133

³ Syahrin Harahap, *Islam, Konsep dan Implementasi Pemberdayaan*, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1999), 131-132.

- c) Masyarakat modern
Memiliki ciri-ciri sebagai berikut; melihat ke masa depan, percaya pada diri sendiri, gaya hidup kreatif, ilmu dan teknologi berpengaruh kuat, masyarakat dinamis, suka mencipta dan menyebarkan informasi, selalu berusaha menciptakan inovasi, usaha hidup dengan *longterm planning, formal control* yang kuat.

Berdasarkan kategori fase masyarakat di atas, dapat kita lihat bahwasanya sasaran pemberdayaan masyarakat adalah masyarakat tradisional dan masyarakat transisi yang masih berorientasi masa lalu yang pasrah akan takdir menjadi masyarakat modern yang berorientasi masa depan yang dinamis memiliki kepercayaan diri dan bertanggung jawab, dari masyarakat yang tanpa perencanaan menjadi masyarakat yang memiliki perencanaan dalam hidupnya. Jika hal ini dapat terlaksana, maka masyarakat akan memberikan partisipasinya yang maksimal terhadap usaha memerangi kemiskinan yang dilakukan.

Adapun dimensi pemberdayaan mencakup tiga hal yang meliputi:⁴

- d) Kompetensi kerakyatan, yang merujuk kepada sebuah proses pembangunan yang bermula dari pertumbuhan individu yang kemudian berkembang menjadi sebuah perubahan sosial yang lebih besar.
- e) Kemampuan sosiopolitik, yaitu pembebasan yang dihasilkan dari sebuah gerakan sosial, dimulai dari pendidikan dan politisasi orang-orang lemah yang merubah struktur-struktur berbasis penekanan.
- f) Kompetensi partisipatif, sebuah keadaan psikologis yang ditandai rasa percaya diri guna mampu mengendalikan diri dan orang lain.

Untuk mengetahui fokus dan tujuan pemberdayaan secara operasional, maka perlu diketahui indikator pemberdayaan yang perlu dioptimalkan dalam penerapan pemberdayaan, indikator tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:⁵

- a) Kebebasan mobilitas (ke pasar, bioskop, rumah ibadah) khususnya jika mampu bepergian sendiri tanpa bantuan jasa transportasi
- b) Kemampuan membeli komoditas kecil; kebutuhan pokok ataupun kebutuhan pribadi, terlebih dengan biaya sendiri

⁴ *Ibid*, 63

⁵ *Ibid*, 64-65

- c) Kemampuan membeli komoditas besar; kebutuhan sekunder dan tersier, terlebih dengan uang sendiri
- d) Terlibat dalam pembuatan keputusan rumah tangga sendiri (*bersama suami atau istri*), misalnya renovasi rumah, membuat usaha, dan lain-lain.
- e) Kebebasan relatif dari dominasi keluarga untuk menentukan keturunan, pekerjaan di luar rumah, membeli perhiasan, tanah, dan sebagainya.
- f) Kesadaran hukum dan politik
- g) Keterlibatan dalam mengaspirasikan suara
- h) Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga; memiliki rumah, tanah, asset produktif dan tabungan.

Indikator lain menyatakan bahwa terdapat empat kunci elemen yang menjadi syarat masyarakat bisa dibilang telah terberdayakan. Pertama adalah mempunyai informasi yang kuat sehingga selalu mengetahui peluang dan tidak tinggal diam dengan penyalahgunaan kebijakan, selanjutnya masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam pembangunan, kemudian akuntabilitas, dapat mempertanggung jawabkan segala dana yang sudah dapat dikelola masyarakat sendiri, dan yang terakhir masyarakat sudah mampu mengorganisir kekuatan mereka sendiri sehingga dapat memobilisasi sumber daya untuk mengatasi masalah kepentingan umum.⁶

3. Model Penerapan Pemberdayaan Masyarakat

Pada abad ke-21, paradigma pembangunan dengan meletakkan perencanaan negara atau pemerintah pada posisi yang sentral mendapat banyak kritik dari para ahli dan pengamat pembangunan. Hal ini disebabkan pembangunan model ini tidak mempercayai kemampuan rakyat akar rumput dalam membangun diri dan masyarakat. Akhirnya, Negara dan Pemerintah yang semula dianggap dapat menjadi pendorong pembangunan, justru dianggap sebagai penghambat pembangunan. Sebagai alternatif, diajukan paradigma baru yang dikenal dengan paradigma pemberdayaan masyarakat sebagai berikut:⁷

⁶ Deepa Narayan, *Empowerment and Poverty Reduction: A Sourcebook*, (Washington, D.C.: Poverty Reduction and Economic Management (PREM), World Bank, 2002), 14-18.

⁷ Anggito Abimanyu, Ed. et al., *Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 1995), 135-136.

3.1. Model pemberdayaan masyarakat di Negara berkembang

Paradigma pemberdayaan masyarakat berdiri pada satu pemikiran bahwa pembangunan akan berjalan dengan sendirinya apabila masyarakat diberi hak untuk mengelola sumber daya alam yang mereka miliki dan menggunakannya untuk pembangunan masyarakat. Paradigma ini kemudian menciptakan tiga model pembangunan pemberdayaan sebagai berikut:⁸

Pertama, adalah model pembangunan masyarakat. Model ini dikembangkan pertama kali oleh pemerintah kolonial Inggris di Etawah, India, pada tahun 1920. Model ini kemudian dijadikan model pembangunan desa bagi negara-negara yang sedang berkembang ketika negara-negara itu baru saja memperoleh kemerdekaan politiknya dari negara kolonial. Inti dari model ini adalah mengajarkan kepada penduduk pedesaan keterampilan sosial, ekonomi, dan politik agar terwujud masyarakat desa yang modern. Pembangunan masyarakat sebagai model pembangunan desa di negara-negara yang sedang berkembang dianggap gagal membangun pedesaan di negara-negara itu karena program-programnya banyak didominasi oleh orang-orang kaya desa. Kelemahan utama adalah bahwa model ini tidak atau lupa memperhatikan bahwa masyarakat pedesaan itu tidak homogen, ada yang kaya ada yang miskin. Si kaya desa tidak hanya menguasai sumber alam seperti tanah tetapi mereka juga sangat berpengaruh dalam kehidupan politik pedesaan.

Kedua, model partisipasi rakyat dalam pembangunan, yang mulai berkembang pada permulaan tahun 1970-an. Alasan utama munculnya model ini adalah karena timbulnya rasa keprihatinan di kalangan para pengamat pembangunan di negara-negara yang sedang berkembang atas gagalnya model "*trickle down effect*"⁹ mencapai tujuan yakni pemerataan hasil pembangunan. Model pembangunan partisipasi itu bertujuan untuk lebih meratakan hasil pembangunan

⁸ *Ibid*, 136-139

⁹ *Trickle down effect* adalah paradigma pembangunan tentang efek langsung – tetesan ke bawah – terhadap kesejahteraan masyarakat miskin ketika hadirnya masyarakat kalangan atas (kaya) dengan dapat membuat usaha pendukung atau meniru usaha yang serupa, sehingga fokus pembangunan untuk menyejahterakan masyarakat golongan atas terlebih dahulu. Akhirnya jurang ketimpangan semakin dalam dan paradigma tersebut gagal total. Dikutip dari Pajar Hatma Indra Jaya, "Trickle Down Effect: Strategi Alternatif Dalam Pengembangan Masyarakat", *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Vol. 1, No. 1, 2012, 77.

dengan demikian diharapkan akan lebih cepat memberantas kemiskinan. Model ini mengalami kegagalan disebabkan oleh prosedur dari perencanaan maupun pelaksanaan dari program-program pembangunan. Aparat perencanaan masih banyak yang melihat bahwa usulan program atau proyek pembangunan yang datang dari bawah tidak memiliki makna pembangunan dan dianggap hanya sebagai “daftar keinginan”. Sementara yang datang dari pemerintah adalah “*felt needs*” yang dibutuhkan rakyat.

Ketiga, model desentralisasi. Dalam model ini maka pemerintah pusat memberi wewenang kepada pemerintah daerah tingkat bawah untuk melaksanakan program-program yang direncanakan oleh pemerintah pusat. Model ini sudah ada kemajuan, namun model ini tidak akan banyak bermafaat kalau keuangan yang mendukung pembangunan itu masih tetap dikuasai pemerintah pusat, sehingga campur tangan dalam pelaksanaan proyek oleh pemerintah pusat masih cukup kuat.

Menurut para ahli, kegagalan-kegagalan tersebut disebabkan karena model pembangunan yang berlaku di negara-negara yang sedang berkembang tidak memberi kesempatan pada masyarakat ikut dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut pemilihan, perencanaan, dan kemudian pelaksanaan program pembangunan. Maka paradigma pemberdayaan yang tepat ingin mengubah kondisi itu dengan cara memberi kesempatan pada kelompok orang miskin untuk merencanakan dan kemudian melaksanakan program pembangunan yang juga mereka pilih sendiri.¹⁰

3.2. Model pemberdayaan masyarakat di Indonesia

Terdapat tiga model program pemberdayaan masyarakat di Indonesia dalam usahanya untuk mensejahterakan masyarakat, antara lain:¹¹

Pertama, model pembangunan nasional yang berorientasi pada pertumbuhan. Model ini hanya fokus pada pertumbuhan angka pendapatan nasional saja, sebagai peningkatan hasil GNP per-tahun sampai angka 7 persen atau lebih. Sehingga proses pembangunan terpusat pada produksi, sementara penghapusan kemiskinan,

¹⁰ *Ibid*, 139.

¹¹ Aziz Muslim, “Pendekatan Partisipatif dalam Pemberdayaan Masyarakat”, *Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama*, Vol. VIII, No. 2, Desember, 2007, 89-91

pengangguran dan ketidakadilan menduduki urutan penanganan kedua, lebih-lebih hanya dicapai dengan teori “*trickle-down effect*”.

Kedua, model pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan dasar. Model ini fokus pada bagian penduduk miskin dan menandakan bahwa masalah kemiskinan yang ada sekarang merupakan akibat dari marginalisasi masyarakat dari proses pembangunan. Model ini melakukan pemenuhan kebutuhan dasar yang mencakup kesempatan memperoleh penghasilan dan akses terhadap pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, transportasi, penerangan dan lain-lain. Alasan utama timbul model pemenuhan kebutuhan dasar ini karena banyak masyarakat yang tidak memiliki aspek produktif selain kekuatan fisik, keinginan kerja, dan inteligensi dasar mereka, selanjutnya tingkat kebutuhan dengan pendapatan yang tidak bisa menjangkau, dan peningkatan standar hidup golongan termiskin yang memerlukan waktu sangat lama, sehingga kerap kali belum dapat bekerja.

Ketiga, model pembangunan yang berpusat pada manusia. Model ini menekankan bahwa pembangunan bukan sekedar meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan nasional serta terpenuhinya kebutuhan pokok saja. Tetapi yang lebih penting lagi upaya meningkatkan partisipasi secara nyata dalam berbagai aktifitas kehidupan untuk mendorong terciptanya produktifitas yang bernilai tinggi.

Model pemberdayaan yang terakhir dirasa lebih tepat oleh banyak kalangan, sebab ia berorientasi pada manusia sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam pemberdayaan mereka sendiri. Peranan masyarakat sebagai fokus sentral dalam pembentukan kesadaran berpartisipasi terhadap pembangunan itu sendiri yang ternyata menjadikan masyarakat pasif dan reaktif menjadi peserta lebih aktif, yang dapat memberikan kontribusinya dalam proses pembangunan sehingga harapannya dapat menyediakan lingkungan yang kondusif bagi aktualisasi potensi dan pertumbuhan masyarakat.¹²

Berbagai kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat telah banyak dilontarkan oleh pemerintah Indonesia. Mulai dari pemberian bantuan langsung sementara masyarakat, bantuan modal melalui program-program yang berbasis pemberdayaan masyarakat, pemberian modal kepada

¹² *Ibid*, 92

kelompok masyarakat yang sedang berkembang usahanya dalam sebuah kelompok usaha, pemberian dana untuk renovasi dan pembugaran rumah tidak layak huni.¹³

Pemberdayaan juga berorientasi pada gerakan sosial yang menjadi alat pendewasaan demokrasi untuk membentuk kemandirian Bangsa dan Negara. Masyarakat diingatkan kembali bahwa mereka punya kekuatan yang dasyat untuk mampu bertahan hidup dimasa lalu. Menghimpun kembali rasa senasib dan sepenanggungan menghadapi berbagai tantangan yang akan muncul, terutama untuk keluar dari belenggu kemiskinan. Masyarakat dituntut untuk berpikir kembali, bahwasanya mereka harus kuat supaya tidak terjajah untuk kedua kalinya di era globalisasi ini.¹⁴

4. Model Pemberdayaan Masyarakat Perspektif Islam

Konsep pemberdayaan telah diterapkan oleh Rasulullah saw. Beliau memberikan contoh terkait prinsip keadilan, persamaan, dan partisipasi di tengah-tengah masyarakat. Sikap toleran yang hakiki tadi sudah diterapkan sejak pemerintahan Rasulullah saw. sehingga mempunyai prinsip untuk selalu menghargai etos kerja, saling tolong-menolong (*ta'awun*) bagi semua warga negara untuk melaksanakan ajaran-ajaran agama. Dengan adanya persamaan beserta kesempatan dalam berusaha maka tidak ada lagi kesenjangan ekonomi dan sosial antara yang satu dengan yang lain.¹⁵

Diantara prinsip-prinsip tersebut terdapat kaitan sangat erat yang selanjutnya akan dijelaskan lebih spesifik sebagai berikut:

4.1. Prinsip keadilan

Kata keadilan di dalam al-Qur'an disebutkan pada urutan ketiga terbanyak dalam al-Qur'an setelah kata Allah dan 'Ilm. Hal ini menunjukkan betapa nilai dasar ini memiliki bobot yang sangat dimuliakan dalam Islam. Keadilan berarti kebebasan bersyarat akhlak Islam yang jika diartikan dengan kebebasan yang tidak terbatas, akan menghancurkan tatanan sosial dalam pemberdayaan manusia.¹⁶

¹³ Wisnu Indrajit VO dan Soimin, *Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan*, (Malang: Cita Intrans Selaras, 2014), 1-2

¹⁴ *Ibid.*, p. 44-47.

¹⁵ Masykur Hakim dan Tanu Widjaya, *Model Masyarakat Madani*, (Jakarta: Intimedia Cipta Grafika, 2003), 16-18.

¹⁶ Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Persepektif Islam*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2004), 80-82.

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ
الْأَنَاسُ بِالْقِسْطِ ۗ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ
وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ۚ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٥٧﴾

“Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya Padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi Maha Perkasa” (QS. Al-Hadid[57]: 25).

Masyarakat muslim yang sesungguhnya adalah yang memberikan keadilan secara mutlak bagi seluruh manusia, menjaga martabat mereka dalam mendistribusikan kekayaan secara adil, memberikan kesempatan yang sama bagi mereka untuk bekerja sesuai dengan kemampuan dan bidangnya, memperoleh hasil kerja dan usahanya tanpa bertabrakan dengan kekuasaan orang-orang yang bisa mencuri hasil usahanya.¹⁷

Keadilan sosial dalam masyarakat muslim berlaku untuk seluruh penduduk dengan berbagai agama, ras, bahasa dan warna kulit. Itulah puncak keadilan, yang tidak dicapai oleh undang-undang internasional atau regular hingga sekarang.¹⁸ Ketika keadilan dapat diterapkan oleh setiap masyarakat muslim yang tinggal di dunia ini, maka masyarakat tidak lagi cemas untuk tidak berdaya dan tertindas oleh pihak yang lebih beruntung.

4.2. Prinsip persamaan

Prinsip persamaan adalah prinsip yang berdiri di atas dasar akidah yang sama sebagai buah dari prinsip keadilan. Islam

¹⁷ Muhammad Ali Al-Hasyimi, “Keadilan dan Persamaan dalam Masyarakat Muslim”, *Jurnal Islamhouse.com*, 2009, 7

¹⁸ *Ibid*, 8

memandang tiap orang secara individu, bukan secara kolektif sebagai komunitas yang hidup dalam sebuah Negara. Manusia dengan segala perbedaannya semua adalah hamba Allah, tidak ada perbedaan dalam kedudukan sebagai manusia, juga dalam hak dan kewajibannya.¹⁹ Bahkan setiap kebutuhan dasar manusia sudah diatur secara menyeluruh, berikut kemungkinan tiap orang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sekunder dan tersiernya sesuai dengan kadar kesanggupan.²⁰

Dalam prinsip persamaan, tidak ada kelebihan sebagian atas yang lain dari segi asal dan penciptaan. Perbedaan hanyalah dari segi kemampuan, bakat, amal dan usaha, dan apa yang menjadi tuntutan pekerjaan dan perbedaan profesi.²¹ Islam juga tidak mengukur hierarki status social sebagai perbedaan. Sebab yang membedakan adalah ukuran ketinggian derajat dari ketaqwaannya kepada Allah. Dengan demikian, semua manusia memiliki kesempatan yang sama untuk dapat berdaya.²²

4.3. Prinsip partisipasi

Partisipasi adalah pokok utama dalam pendekatan pemberdayaan masyarakat dan berkesinambungan serta merupakan proses interaktif yang berkelanjutan. Prinsip partisipasi melibatkan peran serta masyarakat secara langsung dan aktif sebagai penjamin dalam pengambilan keputusan bersama untuk pembangunan diri, kehidupan, dan lingkungan.²³ Partisipasi sebagai kontribusi sukarela yang menimbulkan rasa harga diri dan meningkatkan harkat dan martabat menciptakan suatu lingkaran umpan balik yang memperluas zona dalam penyediaan lingkungan kondusif untuk pertumbuhan masyarakat.²⁴

Pada zaman Rasulullah masyarakat sudah dididik untuk membangun dan menjunjung tinggi Negara dan nilai-nilai peradaban sebagai bentuk masyarakat yang ideal. Pada saat itu

¹⁹ *Ibid*, 20-22

²⁰ Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2009), 52

²¹ Muhammad Ali Al-Hasyimi, "Keadilan dan Persamaan..", 21

²² Mohammad Irham, "Etos Kerja dalam Perspektif Islam", *Jurnal Substantia*, Vol. 14, No. 1, April 2012, 11

²³ Agus Purbathin Hadi, "Konsep Pemberdayaan, Partisipasi Dan Kelembagaan Dalam Pembangunan", *Jurnal Yayasan Agribisnis/Pusat Pengembangan Masyarakat Agrikarya (PPMA)*, 2009, 5

²⁴ Aziz Muslim, ..., 93-97

terbentuknya masyarakat yang memiliki tatanan sosial yang baik, berasas pada prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara hak dan kewajiban individu dengan hak dan kewajiban sosial.²⁵

Pemberdayaan masyarakat dalam Islam harus selalu mengembangkan dan memperkuat kemampuan masyarakat untuk selalu terlibat dalam proses pembangunan yang berlangsung secara dinamis. Dengan demikian masyarakat dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi serta dapat mengambil keputusan secara bebas dan mandiri.²⁶

Maka partisipasi sudah ditanamkan dengan baik pada masyarakat muslim di zaman Rasulullah dan berdampak sangat baik dalam keseimbangan pemberdayaan diantara masyarakat pada saat itu.²⁷

4.4. Prinsip penghargaan terhadap etos kerja

Etos ialah karakteristik dan sikap, kebiasaan serta kepercayaan, bersifat khusus tentang seorang individu atau sekelompok manusia. Istilah 'kerja' mencakup segala bentuk amalan atau pekerjaan yang mempunyai unsur kebaikan dan keberkahan bagi diri, keluarga dan masyarakat sekelilingnya serta negara. Etos kerja dalam Islam adalah hasil suatu kepercayaan seorang Muslim, bahwa kerja mempunyai kaitan dengan tujuan hidupnya, yaitu memperoleh perkenan Allah Swt. Berkaitan dengan ini, penting untuk ditegaskan bahwa pada dasarnya, Islam adalah agama amal atau kerja (*praxis*).²⁸

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ

عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٥٥﴾

dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu,

²⁵ Edi Suharto, Islam, "Modal Sosial dan Pengentasan Kemiskinan, disampaikan dalam Seminar "Indonesia Social Economic Outlook", Dompot Dhuafa, Jakarta 8 Januari 2008, 3

²⁶ Syahrin Harahap, 132

²⁷ Edi Suharto, "Modal Sosial dan Pengentasan Kemiskinan..,3

²⁸ Mohammad Irham, "Etos Kerja dalam Perspektif Islam", *Jurnal Substantia*, Vol. 14, No. 1, April 2012, 12-15

dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan” (QS. At-Taubah[5]: 105).

Ajaran Islam sangat mendorong umatnya untuk bekerja keras, dan bahwa ajaran Islam memuat spirit dan dorongan pada tumbuhnya budaya dan etos kerja yang tinggi. Maka dari itu kemampuan manusia itu sendirilah yang perlu diberdayakan sehingga mereka mampu mengenal diri dan posisi mereka sendiri. Sehingga akan mampu menolong diri sendiri dengan usaha sendiri.²⁹

*“Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah”*³⁰ (HR. Bukhori dan Muslim) demikian Rasulullah mengingatkan.

Dengan demikian, amatlah jelas bahwa Islam tidak memisahkan antara manusia dengan eksistensinya sebagai manusia, serta eksistensinya sebagai manusia dengan pribadinya. Karena itu, Islam mendorong umatnya untuk bekerja, mencari rezeki dan berusaha agar manusia tersebut selalu berdaya. Bahkan Islam telah menjadikan hukum mencari rezeki tersebut sebagai fardhu. Rasulullah saw. juga bersabda: *“Tidaklah seseorang makan sesuap saja yang lebih baik, selain ia makan dari hasil kerja tangannya sendiri.”* (HR. Bukhori, No. 2072)³¹

4.5. Prinsip tolong-menolong (*ta’awun*)

Tolong-menolong (*ta’awun*) menurut bahasa berasal dari bahasa Arab yang artinya berbuat baik. Sedangkan menurut istilah adalah suatu pekerjaan atau perbuatan yang didasari pada hati nurani dan semata-mata mencari ridho Allah swt.³²

Islam berhasil memberikan suatu penyelesaian yang praktis kepada masalah ekonomi modern dengan mengubah sifat masyarakatnya yang hanya mementingkan diri sendiri kepada sifat sebaliknya. Semua orang didorong untuk bekerja bersama-sama dalam menyusun suatu sistem ekonomi berdasarkan prinsip persamaan dan keadilan yang membentuk sebuah prinsip tolong-menolong. Setiap individu menjadi unit yang berguna kepada

²⁹ Edi Suharto, *“Modal Sosial dan Pengentasan Kemiskinan...”*, 1

³⁰ صحيح مسلم، الجزء الأول، (بيروت - لبنان: دار الكتب العلمية)،

12 زموسى شاهين لاشين، تيسير صحيح البخارى، الجزء الثاني، (مكتبة الشروق الدولية: القاهرة)،

³² Sri Laksmi, *“Ta’awun Dalam Kebaikan”*, dalam *Artikel Al Arham*, Edisi 47, diakses pada Rabu, 12 September 2012, pukul 08:01, 1

semua pihak sehingga pemberdayaan masyarakat dapat menyebar lebih luas.³³

“Dan barang siapa memudahkan atas orang yang susah, Allah akan memudahkan atasnya di dunia dan akhirat. Allah senantiasa menolong hamba-Nya, selagi hamba itu mau menolong saudaranya” (H.R. Muslim).³⁴

Berikut orang-orang yang tidak mampu bekerja, maka Islam mewajibkan kepada sekitarnya untuk membantunya. Melakukan injeksi dana bagi masyarakat yang kurang terberdayakan, sebagai aplikasi dari kepedulian mereka, sebagai pihak yang memiliki kelebihan terhadap mereka yang kekurangan. Mulai dari anak-anaknya serta ahli warisnya, ataupun bila yang wajib menanggung tidak ada, maka orang yang terdekat yang mempunyai peran wajib dalam pemenuhan kebutuhannya.³⁵

5. Pendekatan Islam dalam Pemberdayaan Masyarakat

Secara garis besar terdapat dua pendekatan yang digunakan Islam dalam pemberdayaan masyarakat:³⁶ *pertama*, Pendekatan Parsial-Kontinu, yaitu pendekatan dengan cara pemberian bantuan langsung, seperti kebutuhan pokok, sarana dan prasarana. Hal ini diberikan terutama terhadap orang yang tidak sanggup bekerja sendiri. Misalnya orang yang cacat abadi, orang tua lanjut usia, orang buta, orang lumpuh, anak-anak, dan lain sebagainya. *Kedua*, Pendekatan Struktural, yaitu pemberian pertolongan secara kontinu terutama pengembangan potensi skill. Harapannya agar masyarakat yang kurang berdaya dapat mengatasi kemiskinan atau kelemahannya sendiri. Bahkan dari orang yang dibantu diharapkan pada akhirnya menjadi orang yang turut membantu.

Dua pendekatan diatas dapat dilihat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat dalam tiga tahap strategi sebagai berikut:³⁷

³³ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam, Jilid 1*, (Yogyakarta: CV. Taberi, 1995), 74-75

³⁴ عثمان الخميس مع الأستر، نيل الإرب من جامع العلوم والحكم لابن رجب، (وزارة الوقاف و الشؤون الإسلامية: إدارة الدراسات الإسلامية، 1437 هـ)، 430

³⁵ Taqyuddin An-Nabhani, ..95

³⁶ Syahrin Harahap, 91

³⁷ *Ibid*, 124

Pertama, rekonstruksi tahap etika psikologis dari nilai pasif ke nilai aktif terhadap masyarakat akar rumput mengenai kemiskinan. Jadi masyarakat yang kurang terberdayakan diberi penjelasan (*awareness*), menarik minat (*interest*), mencoba (*trial*), dan mempertimbangkan (*evaluation*) bahwa kemiskinan bukanlah suatu takdir bawaan yang mana kita harus diam dan pasrah akan keadaan, selalu menunggu bantuan dari kaum yang beruntung, sehingga tidak menghasilkan perubahan.

Kedua, mengadakan upaya perubahan tingkah laku terhadap fakir miskin yang sudah sadar dan bersemangat tadi, dengan pendidikan ketrampilan, meningkatkan kemampuan manajerial, pengetahuan-pengetahuan melalui pelatihan, penyuluhan, pendampingan, pengembangan teknologi, stimulan, informasi, dan keteladanan. *Ketiga*, mengupayakan perubahan status melalui perwujudan komitmen kemitraan dan suntikan dana seperti modal usaha secara struktural, setelah sudah terampil dan aktif tadi.

Dari pendekatan dan strategi tersebut diharapkan mampu mengantarkan fakir miskin menjadi muslim yang berdaya, berkualitas dan penyantun bagi sesama. Dari penjelasan di atas sehingga terdapat hal-hal yang harus dibentuk dari manusia itu sendiri untuk dapat dikatakan berdaya dan selanjutnya dapat selalu berusaha menolong diri sendiri. Adapun hal-hal tersebut sebagai berikut: (1) membangun dimensi spiritual (*iman*), (2) membangun dimensi pendidikan (*ilmu*), (3) membangun dimensi sosial (*amal*). Jika iman, ilmu dan amal sudah terpenuhi maka mindset masyarakat muslim akan berubah secara drastis. Kemudian tercapailah *falah*³⁸ seperti yang selalu didamba-dambakan masyarakat muslim pada umumnya dan masyarakat muslim dapat terberdayakan.

6. Kesimpulan

Islam dalam pemberdayaan masyarakat berasaskan pada beberapa prinsip yang telah rasul terapkan sejak pertama kali wahyu diturunkan untuk menyebarkan islam yaitu keadilan,

³⁸ *Falah* secara bahasa berarti beruntung, dan dalam konsep ini, *falah* merupakan kebahagiaan (kemenangan atau kesuksesan) dunia-akhirat yang menjadi dambaan setiap manusia. Dikutip dari jurnal Anindya Aryu Inayati, "Pemikiran Ekonomi M. Umer Chapra", *Jurnal Ekonomi Islam*, Universitas Darussalam Gontor, Vol. 2, No. 1, Desember 2013, 6

kesamaan, partisipasi, penghargaan, dan ta'awun. Dalam pemberdayaan itu sendiri digunakan pendekatan parsial-kontiu dan pendekatan struktural agar tercapai 3 dimensi kekuatan masyarakat muslim yaitu dimensi iman, dimensi ilmu dan dimensi sosial (amal).

Daftar Pustaka

- Rahman, Afzalur. 1995. *Doktrin Ekonomi Islam*. Jilid. 1. Yogyakarta. CV. Taberi.
- Hadi, Agus Purbathin. 2009. "Konsep Pemberdayaan, Partisipasi Dan Kelembagaan Dalam Pembangunan". *Jurnal Yayasan Agribisnis/Pusat Pengembangan Masyarakat Agrikarya (PPMA)*.
- Abimanyu, Anggito Ed. et al.. 1995. *Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta. BPFY-Yogyakarta.
- Muslim, Aziz. "Pendekatan Partisipatif dalam Pemberdayaan Masyarakat". *Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama*. Vol. VIII. No. 2. Desember 2007.
- Deepa Narayan. 2002. *Empowerment and Poverty Reduction: A Sourcebook*. Washington, D.C. Poverty Reduction and Economic Management (PREM). World Bank.
- Edi Suharto. Islam, Modal Sosial dan Pengentasan Kemiskinan, disampaikan dalam Seminar "Indonesia Social Economic Outlook". Dompot Dhuafa. Jakarta 8 Januari 2008.
- Sadan, Elisheva. 2004. *Empowerment and Community Planing*. Tel Aviv. Hakibbutz Hameuchad Publishers.
- Ife, Jim & Tesoriero, Frank. 2008. *Community Development: Alternative Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Hakim, Masykur & Widjaya, Tanu. 2003. *Model Masyarkat Madani*. Jakarta. Intimedia Cipta Grafika.
- Irham, Mohammad. "Etos Kerja dalam Perspektif Islam". *Jurnal Substantia*. Vol. 14. No. 1. April 2012.
- Rusli, Muh. & Rakhmawati. "Jihad Perspektif Al-Qur'an". *Jurnal Al-Mu'ashirah*. Vol. 10. No. 2. Juli 2013.
- Al-Hasyimi, Muhammad Ali. 2009. "Keadilan dan Persamaan dalam Masyarakat Muslim". *Jurnal Islamhouse.com*.
- Muhammad. 2004. *Ekonomi Mikro dalam Persepektif Islam*. Yogyakarta. BPFY-Yogyakarta.

- Jaya, Pajar Hatma Indra. "Trickle Down Effect: Strategi Alternatif Dalam Pengembangan Masyarakat". *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*. Vol. 1. No. 1. 2012.
- Nurhadi, Rofiq. "Neo-Mu'tazilisme Harun Nasution dan Kebangkitan Islam Indonesia". *Jurnal Universitas Muhammadiyah Purworejo*. Vol. 60. No. 60. Desember 2004.
- Laksmi, Sri. "Ta'awun Dalam Kebaikan". *Artikel Al Arham*. Edisi 47.
- Harahap, Syahrin. 1999. *Islam, Konsep dan Implementasi Pemberdayaan*. Yogyakarta. PT. Tiara Wacana Yogya.
- An-Nabhani, Taqyuddin. 2009. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif perspektif Islam*. Surabaya. Risalah Gusti.
- Indrajit VO, Wisnu & Soimin. 2014. *Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan*. Malang. Cita Intrans Selaras.

شاهين لاشين، موسى. 2003. تيسير صحيح البخارى. الجزء الثانى. مكتبة الشروق الدولية ز القاهرة.

طبع صحيح مسلم. صحيح مسلم. الجزء الأول. بيروت - لبنان. دار الكتب العلمية.
الخميس مع الآخر، عثمان. 1437. نيل الإرب من جامع العلوم والحكم لابن رجب. وزارة
الوقاف والشؤون الإسلامية. إدارة الدراسات الإسلامية.